

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pengembangan *E-government* di Kabupaten Kendal

Inisiatif penerapan *e-government* di Kabupaten Kendal telah dimulai sejak tahun 2009 dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Kendal. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya pengembangan *e-government* belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diidentifikasi melalui elemen sukses pengembangan *e-government* yang terdiri dari *support*, *capacity*, dan *value*. Elemen-elemen tersebut merupakan hal yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh sektor publik dalam menerapkan konsep digitalisasi.

Support merupakan seberapa jauh dukungan pemerintah dalam melakukan pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal sudah didukung dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan paling tinggi dalam memberikan kesepakatan pelaksanaan pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kesepakatan pemerintah Kabupaten Kendal tidak hanya semata melihat dari visi misi dan regulasi yang

ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga tentang pengalokasian sumber daya manusia. Pembentukan tim PPTIK yang berfungsi sebagai pengelola *e-government* di masing-masing sektoral pemerintah membantu pelaksanaan pengembangan *e-government* di masing-masing instansi pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal. Peluncuran UP4 (Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperbaiki pelayanan publik. Hadirnya UP4 ini mempermudah mekanisme interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui berbagai kanal akses yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti website resmi Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id) dan apps knok-knok.

Selanjutnya, penerapan *e-government* memerlukan sosialisasi secara terus menerus baik dengan kalangan birokrat maupun masyarakat. Sosialisasi pengembangan *e-government* sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui berbagai cara seperti rapat koordinasi dan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan berbagai perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan PPTIK (Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi) ataupun sosialisasi secara langsung ke SMA/SMK yang ada di Kabupaten Kendal. Namun, kegiatan sosialisasi yang diperuntukan untuk masyarakat masih belum maksimal karena pada tahun ini kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tidak ada.

Kapasitas sumberdaya sangat diperlukan dalam meningkatkan pengembangan *e-goveernment*. Kapasitas sumber daya finansial sebagai

tolok ukur keseriusan pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan *e-government* dirasa masih minim. Selanjutnya, kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal sudah cukup memadai, dimana di masing-masing lembaga pemerintah telah memiliki perangkat keras komputer dan jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Kendal selaku pengelola sudah cukup memadai, hanya saja sumber daya manusia yang ada di masing-masing lembaga masih perlu ditingkatkan karena sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal kurang memiliki inisiatif dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Pengembangan *e-government* tidak ada gunanya jika tidak memberikan manfaat bagi penyedia layanan dan penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Kendal selaku penyedia layanan mendapatkan manfaat yang cukup banyak dengan adanya pengembangan *e-government* ini. Manfaat tersebut diantaranya pemerintah dapat berinteraksi dengan instansi pemerintahan lain, pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mengurangi biaya administrasi dan pemerintah bekerja lebih efektif dan efisien. Tetapi, masyarakat sebagai penerima layanan *e-government* belum merasakan secara nyata manfaat dari adanya pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan *e-government* masih terlihat

kurang informatif karena informasi yang disediakan kurang *updatw* sehingga tidak memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan. Padahal tujuan daripada pengembangan website resmi pemerintah Kabupaten Kendal adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* masih mengalami masalah ataupun kendala dimana terdapat masalah teknis seperti *server down* dan jaringan yang mendadak terputus. Pelaksanaan pengembangan *e-government* juga mengalami kendala kurangnya sosialisasi. Penanggung jawab pelaksanaan pengembangan *e-government* mengakui sosialisasi pengembangan *e-government* belum dilakukan secara terus menerus karena tidak adanya biaya untuk kegiatan sosialisasi *e-government* kepada masyarakat

5.1.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengembangan *E-government* di Kabupaten Kendal

Di dalam pengembangan *e-govenrment* di Kabupaten Kendal terdapat faktor-faktor yang menghambat yang mempengaruhi pengembangan *e-government*. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya faktor-faktor penghambat tersebut adalah belum adanya regulasi, anggaran yang masih minim, sumber daya manusia yang masih rendah, *server* utama yang sering mengalami *down*, dan inisiatif pemerintah yang masih kurang.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Kendal belum memiliki regulasi yang mengatur tentang *e-government* sebagai payung hukum yang kuat dalam penerapan *e-government*. Kedua, anggaran yang masih minim yang dimaksud adalah jumlah alokasi dana yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Kendal untuk pengembangan *e-government* bagi pengelola *e-government* masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan baik pembelian aplikasi maupun alat pendukung sebagai penunjang penerapan *e-government* di Kabupaten Kendal. Sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan hanya mampu untuk perawatan sarana prasarana. Ketiga, meskipun sumber daya manusia yang ada di Diskominfo Kabupaten Kendal sudah dibekali dengan kemampuan IT yang memadai, namun sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal masih menjadi perhatian pemerintah karena keengganan mereka untuk memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, tidak adanya inisiatif sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi pemerintahan untuk mengelola *e-government* menyebabkan beberapa pengelolaan website terbengkalai seperti website yang dimiliki oleh BNN Kabupate Kendal. Keempat, *Server down* yang sering dialami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal menjadi penghambat pemerintah dalam melakukan transaksi secara elektronik yang tidak dapat dipredikasi manakala terjadi mati lampu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan agar pelaksanaan pengembangan *e-government* dapat berjalan semakin optimal adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kendal harus segera membuat regulasi berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah untuk mendukung pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Kendal. Hal ini untuk mendorong masing-masing OPD agar tidak mengesampingkan pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal.
2. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia khususnya aparatur pemerintah masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah secara terus menerus. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kendal masih perlu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan penataan dalam pendayagunaan, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal atau pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan secara rutin.
3. Meskipun pemerintah Kabupaten Kendal sedang fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tetapi jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan publik yang lainnya. Hal ini dikarenakan untuk membangun sebuah *e-government* dibutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga ketika anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tidak

mencukupi maka insiasi *e-government* tidak akan mencapai keberhasilan.

4. Perlu adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana infrastruktur seperti *web server* masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan *genset* sebagai pengganti tenaga listrik ketika terjadi mati listrik.
5. Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang keberadaan penerapan *e-government* dan pemanfaatannya melalui radio, selebaran, stiker, spanduk, maupun mengadakan sosialisasi yang mempertemukan langsung antara pemerintah dengan masyarakat.
6. Untuk mensiasati hambatan-hambatan yang muncul, pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan *e-government*.